

Analisis Politik Luar Negeri Afghanistan terhadap Indonesia dalam Upaya Mediasi Konflik Afghanistan Tahun 2017-2019

Liza Umami

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Abstrak

Konflik Afghanistan yang telah berlangsung lama belum menemukan titik temu perdamaian antara pemerintah Afghanistan dan Taliban sehingga melibatkan semua pihak terkait, termasuk negara-negara besar seperti Amerika Serikat (AS). Pemilihan Indonesia sebagai mediator konflik merupakan hal yang menarik mengingat posisi Indonesia yang notabene berada di kawasan Asia Pasifik yang jauh dari pusat konflik. Untuk menganalisis arah politik luar negeri Afghanistan dan faktor-faktor terhadap Indonesia, penulis menggunakan metode kualitatif-eksplanatif, penggalan data melalui wawancara, penelusuran buku, jurnal dan berita online, serta menggunakan konsep analisis politik luar negeri K. J. Holsti. Penelitian ini menemukan bahwa pengambilan keputusan Afghanistan terkait resolusi konflik dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal. Ketertarikan Afghanistan terhadap Indonesia didorong oleh beberapa kesamaan, antara lain, karakteristik penduduk Muslim, negara demokratis, serta peran ulama. Selain itu, keaktifan Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia, pengalamannya dalam menangani konflik dalam negeri yang majemuk, politik luar negeri yang netral dan tidak memiliki kepentingan apapun di konflik Afghanistan, sekaligus pengaruh ormas Islam dalam perdamaian dan pembangunan Indonesia dan dunia telah menarik perhatian Afghanistan untuk memilih Indonesia sebagai mediator.

Kata Kunci: *Politik Luar Negeri, Afghanistan, Indonesia, Mediasi Konflik*

Pendahuluan

Perang Afghanistan telah berlangsung lama sejak invasi Uni Soviet tahun 1979, di mana pada akhirnya pejuang Mujahidin Afghanistan berhasil mendepak tentara beruang merah. Ternyata, keberhasilan ini tidak bertahan lama karena perpecahan antarfaksi terus berlanjut. Kehadiran Taliban semakin memudahkan harapan perdamaian bagi rakyat Afghanistan. Perang Afghanistan kembali terjadi pada tahun 2001, yang merupakan akibat dari serangan Al-Qaeda terhadap World Trade Center (WTC) di New York pada 11 September 2001. Invasi Amerika Serikat (AS) tersebut ditujukan untuk menangkap Osama bin Laden yang bersembunyi di Afghanistan dengan bantuan Taliban. Meskipun telah dikalahkan oleh pasukan koalisi pimpinan AS, Taliban tidak menyerah dan memilih untuk memberontak terhadap pemerintahan baru yang demokratis di bawah kepemimpinan Hamid Karzai. Perannya sebagai pemimpin mendapatkan dukungan dari *Emergency Loya Jirga* atau “Ekspresi Tertinggi Rakyat Afghanistan” yang merupakan perkumpulan massa nasional dengan perwakilan dari berbagai etnis, agama, dan komunitas kesukuan di Afghanistan.¹

Bantuan AS yang lain seperti pelatihan tentara Afghanistan serta penempatan lebih banyak pasukan AS di Afghanistan hingga tahun 2017 diharapkan dapat membantu pasukan keamanan Afghanistan dalam melawan pemberontakan. Sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah Afghanistan yang dianggap sebagai “boneka AS”, Taliban semakin gencar melakukan penyerangan tidak hanya terhadap aset-aset pemerintah, tetapi juga warga sipil. Taliban tidak menyetujui gencatan senjata selama pasukan asing masih berada di Afghanistan. Hal ini mempersulit upaya perdamaian di negeri tersebut.

Didorong oleh janji kampanye di pemilihan presiden tahun 2016 untuk menarik pasukan dari negara asing, Presiden AS Donald Trump mengupayakan negosiasi yang kemudian terlaksana pada Juni 2017 dan Februari 2018 melalui pertemuan perdana *The Kabul Process For Peace and Security Cooperation* bersama dengan

¹ Frud Bezhani, “Loya Jirga: An Afghan Tradition Explained,” *Radio Free Europe/Radio Liberty*, 20 November 2013, <https://www.rferl.org/a/afghanistan-loya-jirga-explainer/25174483.html>

beberapa negara dan komunitas internasional lainnya. Selanjutnya, utusan AS dan Taliban berhasil dipertemukan di Doha, Qatar. Pertemuan ini berfokus pada penarikan mundur pasukan AS secara bertahap dan desakan Taliban agar semua pasukan AS segera angkat kaki dari Afghanistan sebelum pemberontak setuju untuk bernegosiasi dengan pemerintah Afghanistan. Ada empat permasalahan terkait upaya perdamaian ini, antara lain, penarikan pasukan AS, jaminan bahwa tidak ada teroris yang menargetkan AS, gencatan senjata, dan negosiasi dengan pemerintah Afghanistan. Pemerintahan Afghanistan pun tidak tinggal diam, beberapa percobaan untuk mencapai perdamaian dilancarkan, namun belum membuahkan hasil sama sekali karena Taliban sendiri tidak mengakui legitimasi pemerintah Afghanistan. Selain itu, rencana penarikan pasukan AS menimbulkan kekusaran bagi Afghanistan: apakah Afghanistan dapat berdiri sendiri tanpa dukungan bantuan militer dan dana dari luar selama setengah dekade ke depan?²

Pada April 2017 Presiden Ashraf Ghani melakukan *Three Nation Asia-Pacific Tour* ke Australia, Indonesia dan Singapura untuk membahas beberapa isu penting seperti antiterorisme, tata pemerintahan, pendidikan, dan kerjasama ekonomi. Komunikasi intensif Afghanistan-Indonesia terjalin sejak April 2017 yang ditandai dengan kunjungan bersejarah Presiden Ghani ke Indonesia. Saat berada di Indonesia, Ghani meminta Indonesia membantu Afghanistan keluar dari konflik sipil yang semakin tidak terkendali. Presiden Indonesia Joko Widodo menyanggupi permintaan tersebut dan melakukan kunjungan balasan ke Afghanistan tahun 2018. Jokowi mengusulkan pertemuan ulama internasional sebagai langkah awal untuk mendamaikan pihak yang berseteru. Terjadilah Pertemuan Trilateral Ulama pada 11 Mei 2018 antara Indonesia, Afghanistan, dan Pakistan yang menghasilkan *Bogor*

² Anthony H. Cordesman, *Afghanistan: A War in Crisis* (Center for Strategic & International Studies, 2019).

Ulama Declaration for Peace.³ Isi keseluruhan deklarasi itu menyerukan perdamaian secepatnya dan menolak adanya kekerasan dan terorisme.

Beberapa penelitian terkait konflik Afghanistan membahas persetujuan antara Taliban dengan pemerintahan Afghanistan. Sebagai kelompok *belligerent*, Taliban menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya, yaitu merebut kembali kekuasaan dengan menggulingkan pemerintahan di Kabul. Hal ini jelas menimbulkan ketidakstabilan di negara tersebut.⁴ Menurut Shantie Mariet D'Souza, Taliban sulit untuk dikalahkan meskipun telah berperang lama melawan koalisi pimpinan AS karena adanya transformasi aktor-aktor terkait dalam konflik yang mendukung posisi Taliban.⁵ Kompleksitas konflik Afghanistan membuat negosiasi makin sulit diwujudkan. Perang Iraq tahun 2003 membuat fokus dunia beralih dari Afghanistan sehingga tidak ada upaya dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk bernegosiasi.⁶ Di saat yang sama, Taliban semakin mengukuhkan posisinya di Afghanistan yang berakibat buruk bagi upaya negosiasi.

Menggunakan konflik perbatasan Afghanistan-Pakistan sebagai studi kasus, Umiyati Haris menyatakan bahwa rekonsiliasi merupakan langkah penyelesaian konflik yang tepat mengingat kedua negara memiliki banyak kesamaan. Meskipun telah ada dialog dan proses tindak lanjut, rekonsiliasi tersebut tidak didasari oleh sikap saling percaya sehingga konflik tetap terjadi.⁷ Robert M. Cassidy mengusulkan dua strategi kontra-pemberontakan dan anti-terorisme untuk menyelesaikan konflik perbatasan antara Afghanistan dan Pakistan di wilayah Pashthun melalui upaya

³"Ikhtiar Indonesia Damaikan Afghanistan dan Taliban," *CNN Indonesia*, 31 Juli 2019, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190730180456-106-416860/ikhtiar-indonesia-damaikan-afghanistan-dan-taliban>

⁴ Masaoda, "Rekam Jejak Aktivitas Taliban di Afghanistan Tahun 2014-2018 (Era Presiden Ashraf Ghani)," (Skripsi, Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2018).

⁵ Shantie Mariet D'Souza, "Taliban: The Rebels Who Aspire to be Rulers," *Journal of Asian Security and International Affairs* 3, no. 1 (2016): 20-40.

⁶ Ellaha Abassi, "Afghanistan, Negotiations with the Taliban (Analysis of the Post-2001 Negotiation Process Through the Application of the Path Dependency Theory)," (Tesis Magister, Universiteit Leiden, 2016).

⁷ Umiyati Haris, "Penyelesaian Konflik Afghanistan-Pakistan: Sebuah Pendekatan Rekonsiliasi," (Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2016).

deeskalasi secara komprehensif dengan melibatkan semua aktor berkepentingan.⁸ Kedua penelitian ini menunjukkan pentingnya penyelesaian konflik melalui deeskalasi. Menurut penulis, salah satu upaya mencapai perdamaian adalah mediasi pihak ketiga yang netral. Inilah yang menjadi fokus penelitian, di mana penulis tertarik untuk menganalisis peran Indonesia dalam mediasi konflik antara pemerintah Afghanistan dengan kelompok Taliban. Dalam studinya H Handy Dwi Prasetyo menyoroti faktor-faktor baik internal maupun eksternal yang melatarbelakangi kesediaan Indonesia untuk membantu proses perdamaian di Afghanistan.⁹ Namun, berbeda dengan penelitian tersebut, penulis mengambil perspektif Afghanistan sebagai pihak yang meminta Indonesia untuk menjadi mediator dalam upaya penyelesaian konflik di negaranya dalam kurun waktu 2017-2019.

Penelitian ini menggunakan konsep resolusi konflik dan analisis politik internasional. Dalam studi konflik, ada tiga tahap pengaturan konflik, yaitu pencegahan konflik (*Conflict Prevention*), manajemen konflik (*Conflict Management*), dan resolusi konflik (*Conflict Resolution*) yang dapat diaplikasikan di berbagai fase konflik. Pencegahan konflik berlaku di tingkat awal sebelum konflik menjadi nyata. Manajemen konflik diterapkan ketika konflik muncul, tetapi sebelum kekerasan terjadi. Sedangkan resolusi konflik dilaksanakan pada fase deeskalasi setelah konflik kekerasan terjadi.¹⁰ Konflik dapat diselesaikan berdasarkan intensitasnya. Beberapa metode resolusi konflik yang bisa dipilih oleh pihak yang bersengketa, antara lain, negosiasi, mediasi, arbitrase, pengadilan, dan kooperasi. Metode resolusi konflik yang digunakan dalam penelitian ini adalah mediasi. *The United Nations (UN) Guidance for Effective Mediation* mendefinisikan mediasi sebagai proses sukarela di mana

⁸ Robert M. Cassidy, "The Afghanistan Choice: Peace or Punishment in the Pashtun Belt," *The RUSI Journal* 155, no. 4 (2010): 38-44.

⁹ H Handy Dwi Prasetyo, "Politik Luar Negeri Indonesia dalam Membantu Proses Perdamaian di Afghanistan (2011-2016)," (Skripsi, Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2017).

¹⁰ Niklas L. P. Swanström dan Mikael S. Weissman, "Conflict, Conflict Prevention, Conflict Management and Beyond: A Conceptual Exploration," Concept Paper, Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program, 2005, https://www.files.ethz.ch/isn/113660/2005_swanstrom-weissman_concept-paper_conflict-prevention-management-and-beyond.pdf

penunjukkan pihak ketiga dilakukan atas persetujuan masing-masing pihak yang terlibat dalam rangka penyelesaian konflik.¹¹

Menurut Kalevi Jaako Holsti, atau K. J. Holsti, politik luar negeri adalah tindakan atau gagasan yang dirancang untuk memecahkan masalah atau membuat perubahan dalam suatu lingkungan. Implementasi dari politik luar negeri disebut sebagai kebijakan luar negeri yang perumusannya tidak dapat dilepaskan dari faktor internal seperti aspek ekonomi, politik dalam negeri, situasi sosial, kelompok kepentingan, dan lain sebagainya. Di sisi lain, faktor eksternal yang berasal dari sistem internasional, seperti hubungan antarnegara, aliansi, dan kerjasama, juga memengaruhi pengambilan keputusan terkait kebijakan luar negeri suatu negara. Dengan demikian, setiap negara mengupayakan dan merealisasikan kepentingan nasionalnya dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal dalam memutuskan bentuk kebijakan luar negeri yang efektif.

K. J. Holsti membagi empat unsur dalam pengambilan kebijakan luar negeri. Pertama, orientasi politik luar negeri yang berupa sikap atau komitmen sebuah negara sebagai respons terhadap lingkungan internasional, serta strategi dasar untuk memperoleh aspirasi domestik dan dunia internasional dalam rangka mengantisipasi ancaman yang kemungkinan terjadi. Berdasarkan struktur kekuasaan dan pengaruh serta perilaku tiap-tiap unit politik dalam sistem internasional, setidaknya terdapat tiga bentuk orientasi politik luar negeri: (1) Isolasi, (2) Non Blok, dan (3) Persekutuan militer dan koalisi diplomatik.¹² Kedua, peranan nasional yang telah ditetapkan sebagai bentuk kebijaksanaan politik luar negeri dalam menghadapi masalah di luar negaranya baik itu terlihat jelas ataupun tidak. Konsep peranan juga mencerminkan kecenderungan pokok dan sikap negara terhadap lingkungan eksternal, geografi serta ekonomi. Secara spesifik menurut Holsti ada tiga tipe umum variabel umum untuk menganalisis konsepsi peranan nasional yang dimiliki oleh suatu negara: (1) Kondisi

¹¹ Initiative Mediation Support Deutschland, "Basics of Mediation: Concepts and Definitions," Januari 2016 (revisi Januari 2017),

<https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/Basics%20of%20Mediation.pdf>

¹² K. J. Holsti, *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis* (Bandung: Binacipta, 1992), 133.

Ekstrem, meliputi persepsi ancaman dan perubahan penting dalam kondisi di luar negeri, (2) Atribut Nasional, yaitu mencakup kemampuan lemah atau kuat, pendapat dan sikap umum, kebutuhan ekonomi dan komposisi etnis negara, dan (3) Atribut ideologis dan sikap, yang meliputi kebijakan atau peran tradisional, pendapat dan sikap umum, urusan humaniter, prinsip ideologis, identifikasi kawasan dan kesesuaian nilai dengan negara lain.¹³ Holsti menetapkan spektrum jenis peranan nasional dari tingkatan tertinggi hingga terendah. Urutan teratas merefleksikan keaktifan dan keterlibatan tinggi dan memiliki karakter kuat dalam sistem internasional; urutan terbawah menunjukkan tingkat keterlibatan rendah, sedikit tindakan politik luar negeri, pasif dan lemah.¹⁴ Ketiga, tujuan politik luar negeri atau kepentingan nasional. Keempat, tindakan yang didasarkan pada beberapa variabel, antara lain (1) Kesan, nilai, keyakinan, serta kepribadian atau kebutuhan politik individual pengambil keputusan, (2) Tatanan dan kondisi sistem internasional, (3) Kebutuhan domestik, (4) atribut dan perilaku nasional, (5) Nilai sosial, opini masyarakat dan kelompok kepentingan, serta (6) Kebutuhan, nilai, dan tradisi organisasi.¹⁵

Holsti memandang politik luar negeri sebagai kombinasi dari orientasi, peran nasional, tujuan dan tindakan. Orientasi merujuk pada sikap dan komitmen umum terhadap lingkungan eksternal dan ia menggabungkan strategi dasar untuk mencapai tujuan eksternal dan domestik terutama dalam menghadapi ancaman. Peran nasional merupakan definisi keputusan umum, komitmen, aturan dan tindakan dari pembuat kebijakan yang sesuai dengan negara mereka dan persepsi bagaimana seharusnya negara tampil dalam pengaturan beragam isu dan geografis. Selanjutnya tujuan adalah sebuah kondisi yang diharapkan untuk dicapai di masa depan dengan memiliki pengaruh di luar negeri baik itu merubah atau mempertahankan perilaku suatu negara.

¹³ K. J. Holsti, *Politik Internasional: Kerangka untuk Analisis, Edisi Keempat, Jilid Kedua* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1983), 83.

¹⁴ K. J. Holsti, "National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy," *International Studies Quarterly* 14, no. 3 (1970): 246.

¹⁵ Holsti, *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis*, 468.

Terakhir yakni tindakan adalah kebijakan nyata pemerintah yang dilakukan terhadap negara lainnya.¹⁶

Berdasarkan analisis politik luar negeri Holsti seperti yang diuraikan di atas, penulis berargumen bahwa penunjukkan Indonesia sebagai mediator dalam konflik Afghanistan disebabkan oleh lemahnya legitimasi pemerintah Afghanistan di mata Taliban. Untuk mengatasi kebuntuan negosiasi antara keduanya, sekaligus sebagai upaya deeskalasi konflik, peran Indonesia menjadi penting. Maka dari itu, Presiden Ghani datang ke Indonesia untuk mempelajari bagaimana demokrasi dan Islam dapat hidup berdampingan. Hal ini diharapkan akan mampu membantu penyelesaian konflik di Afghanistan.

Artikel ini dibagi ke dalam beberapa pembahasan. Pertama, penulis menjabarkan metodologi yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, penulis memaparkan hasil analisis data. Bagian penutup berupa kesimpulan.

Metode

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif-eskplanatif. Metode ini digunakan untuk menjawab masalah penelitian dengan data yang berupa narasi yang diperoleh dari aktivitas wawancara dan penggalian dokumen. Penelitian juga dilakukan melalui pengamatan di lapangan dengan menghubungkan fakta-fakta serta fenomena- fenomena sosial. Selain itu, penelitian kualitatif lebih mengutamakan logika induktif dimana dari tangkapan fakta yang ada kemudian dianalisis sehingga baru dapat melakukan teorisasi atau kategorisasi berdasarkan hasil pengamatan si peneliti. Berdasarkan pernyataan S. Aminah dan Roikan, penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman suatu makna yang dibangun oleh individu, di mana ia lebih cenderung memusatkan perhatian kepada peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data.¹⁷ Data yang dianalisis akan menghasilkan penjelasan

¹⁶ Vinsensio Dugis, "Explaining Foreign Policy Change," *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik* 21 (2): 101-104.

¹⁷ S. Aminah dan Roikan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik* (Jakarta: Prenamdia Group, 2019), 55.

yang bersifat deskriptif, bukan prediktif, untuk memahami secara mendalam sudut pandang subjek penelitian. Penelitian eksplanatif bertujuan menguji prediksi atau prinsip suatu teori yang digunakan serta mengelaborasi suatu penjelasan yang detail dari suatu teori.¹⁸

Metode yang digunakan peneliti untuk memperoleh data adalah metode dokumenter, penelusuran data *online* dan wawancara. Instrumen dokumentasi sebagai salah satu cara penggalian data semakin berkembang dan dapat digunakan untuk pendekatan analisis. Subjek penelitiannya dapat berupa buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, bahkan benda-benda bersejarah seperti prasasti dan artefak.¹⁹ Selain itu, bahan dokumenter lainnya yang lebih lengkap berupa otobiografi, surat-surat pribadi, buku-buku atau catatan harian, memorial, kliping, dokumen pemerintah maupun swasta, cerita roman dan cerita rakyat, data di *server* dan *flashdisk*, data tersimpan di *web site* dan lain-lain.²⁰ Di samping itu, teknik lainnya adalah wawancara. Wawancara merupakan salah satu instrumen penting karena data yang dihasilkan berupa penegasan dan bersifat terbuka, menyeluruh dan tidak terbatas, sehingga mampu membentuk informasi yang utuh untuk memenuhi kebutuhan penelitian kualitatif.²¹

Penulis juga menggunakan metode wawancara *purposive sampling* untuk mengidentifikasi beberapa informan yang berpotensi dalam isu perdamaian Afghanistan. Penggunaan *purposive sampling* khusus untuk penelitian lapangan yang menggunakan pengamatan para ahli dalam memilih kasus dengan tujuan tertentu dan sumber informatif yang sesuai dengan kasus yang dipilih. Metode ini dapat mengidentifikasi jenis kasus tertentu secara mendalam juga pemahaman yang lebih

¹⁸ Prof. Dr. Muchlis Hamdi, M.P. A. dan Dr. Siti Ismaryati, "Modul 1: Filosofi Penelitian,"

<http://repository.ut.ac.id/4613/1/MAPU5103-M1.pdf>

¹⁹ D. Clemmens, "Adolescent Motherhood: A Meta-Synthesis of Qualitative Studies," *American Journal of Maternal Child Nursing* 28, no. 2 (2003): 93-99.

²⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 123-124.

²¹ Thalha Al Hamid, dkk., *Resume Instrumen Pengumpulan Data* (Sorong: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2019).

komprehensif tentang kasus tersebut. Informan-informan tersebut adalah wakil dubes Afghanistan, staff Kementerian Luar Negeri Indonesia dan jurnalis internasional Pizzaro Ghozali.

Untuk menarik suatu kesimpulan dari suatu fenomena tertentu dalam penelitian kualitatif, pola pikir induktif menjadi gambaran bagi rangkaian proses penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti. Cara berpikir dalam rangka menarik kesimpulan dari yang khusus ke yang bersifat umum ini disebut sebagai berpikir induktif.²² Pendekatan kualitatif-deskriptif digunakan untuk memperoleh gambaran utuh dari permasalahan penelitian dengan cara memfokuskan pada proses dan pencarian makna dibalik fenomena yang muncul dalam penelitian agar informasi yang dikaji lebih bersifat komprehensif, mendalam, alamiah, dan apa adanya.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk meningkatkan kredibilitas data, peneliti menggunakan beberapa sumber data dan metode yang berbeda—triangulasi data. Semakin banyak persetujuan berbagai sumber data tentang masalah tertentu, semakin dapat dipercaya suatu interpretasi tersebut.²³ Salah satu metode triangulasi yang akan digunakan oleh peneliti adalah *source triangulation* yang mencakup banyak data dari berbagai sumber. Sumber tersebut seperti informan dengan peran beragam, yaitu pelajar, pengajar dan administrator pemerintah supaya menimalisir dan memahami beberapa penyimpangan data.

Konflik Afghanistan

Konflik Afghanistan merupakan perang antara Taliban dan AS yang berusaha melindungi pemerintah Afghanistan yang dipilih melalui pemilihan umum. Sejak invasi AS ke Afghanistan, Taliban memposisikan diri sebagai kelompok pemberontak. Pada mulanya, AS hanya ingin menumpaskan Al-Qaeda dan

²² John M. Creswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 61.

²³ Sari Wahyuni, *Qualitative Research Method: Theory and Practice* (Jakarta: Salemba Empat, 2015), 40.

afiliasinya yang terindikasi telah bersarang di Afghanistan. Pada tahun 2016 komandan AS memperkirakan ada sekitar 100-300 pejuang Al-Qaeda dan ia juga mengatakan bahwa hubungan Al-Qaeda dan Taliban semakin dekat.²⁴ Eksistensi Taliban tidak lepas dari peran Pakistan melalui *the Inter-Services Intelligence Directorate of the Army* (ISI). ISI pernah memberikan tempat berlindung bagi Taliban, nasihat tentang persoalan militer dan diplomatik, serta bantuan penggalangan dana.²⁵ Perang telah terjadi selama hampir dua dekade. Taliban sebagai pemberontak tidak akan pernah berhenti jika pasukan asing masih ada di Afghanistan.

Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah Afghanistan dan aktor internasional lainnya untuk mencapai kesepakatan perdamaian dengan Taliban. Upaya militer yang dikerahkan oleh komunitas internasional mengalami kegagalan karena Taliban sulit untuk dimusnahkan. Di bulan Mei 2015, perwakilan Taliban dan pemerintah Afghanistan bersedia untuk melakukan pembicaraan perdamaian di Qatar. Kedua belah pihak setuju untuk mengadakan pertemuan lanjutan, namun Taliban tetap bersikeras untuk melawan hingga semua pasukan asing meninggalkan Afghanistan.²⁶ Lebih dari enam puluh orang dari sekelompok perwakilan politik, masyarakat sipil, dan perwakilan pemerintah duduk berhadapan dengan puluhan perwira politik Taliban untuk membicarakan konflik di negara mereka. Tahap pertemuan ini menjadi langkah penting bagi mereka untuk mencapai perdamaian. Hasil yang ingin diperoleh yaitu jaminan kontraterorisme dari Taliban, penarikan pasukan asing, negosiasi intra-Afghanistan dan kesepakatan gencatan senjata permanen serta komprehensif.²⁷

²⁴ Kenneth Katzman dan Clayton Thomas, "Afghanistan: Post-Taliban Governance, Security, and U.S. Policy," *Congressional Research Service*, 13 Desember 2017, 18-19.

²⁵ Bruce Riedel, "Pakistan, Taliban, and the Afghan Quagmire," *The Brookings Institute*, 24 Agustus 2013, <https://www.brookings.edu/opinions/pakistan-taliban-and-the-afghan-quagmire/>

²⁶ "Afghanistan Profile - Timeline," *BBC*, 9 September 2019, <https://www.bbc.com/news/world-south-asia-12024253>

²⁷ Omar Samad, "An Afghan Opening: Opportunities, Challenges, and Pitfalls," *Atlantic Council*, 11 Juli 2019, <https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/an-afghan-opening-opportunities-challenges-and-pitfalls/>

Pertemuan intra-Afghanistan ini diselenggarakan dengan bantuan pemerintah Jerman dan merupakan lanjutan pembicaraan di Moskow pada tahun 2014 tanpa kehadiran perwakilan Afghanistan. Ada beberapa isu yang belum dapat diselesaikan dan tantangan dalam mencapai kesepakatan perdamaian, seperti perbedaan keinginan dan pendapat mengenai bagaimana cara terbaik untuk membangun Afghanistan. Selain itu, Taliban menolak gencatan senjata sementara atau permanen. Secara retorika Taliban mendukung prinsip inklusi sosial dan politik, pemerintahan Islam, dan hak-hak perempuan dan minoritas, tetapi komitmen mereka untuk memenuhi kewajiban hukum internasional masih diragukan. Kerangka kerja perdamaian berupa empat langkah yang ditempuh dalam percakapan intra-Afghanistan diharapkan Taliban dapat membuat kesepakatan lanjutan dengan AS.

Pada tahun 2018, AS mengajukan proposal untuk mengadakan negosiasi dengan Taliban di Doha, Qatar. Sayangnya, pertemuan ini dibatalkan oleh AS akibat ulah Taliban yang megebom mobil dan menewaskan dua belas orang, termasuk seorang tentara AS. Sebelum pertemuan AS dan Taliban, pemerintah Afghanistan telah berkali-kali mengajak negosiasi Taliban tanpa prasyarat apapun. Bahkan Ghani menawarkan pengakuan terhadap Taliban sebagai partai politik yang sah, mengusulkan gencatan senjata, dan pembebasan tahanan. Namun, Taliban menolak pembicaraan langsung dengan Kabul dan gencatan senjata. Sebagai gantinya, Taliban mengajukan pengurangan kekerasan (*Reductional Violence*) yang justru ditolak oleh pemerintah Afghanistan karena hal itu tetap akan memakan korban dan bukan perdamaian seutuhnya.²⁸ Atas dasar inilah pemerintah Afghanistan mengupayakan penyelesaian konflik melalui jalur mediasi dengan meminta bantuan dari Indonesia sebagai pihak penengah.

Empat Unsur Politik Luar Negeri Afghanistan

Menurut Holsti, negara dengan orientasi non-blok menekankan pada penggunaan kemampuan non-militer demi kepentingan negara lain. Keputusan politik luar negeri

²⁸ Zalmi Wafamal (Wakil Duta Besar Afghanistan untuk Indonesia), dalam sebuah wawancara dengan penulis, 5 Februari 2020.

suatu negara dilakukan berdasarkan kehendak negara sesuai kepentingannya serta tidak membutuhkan jaminan dari negara lain akan eksistensinya.²⁹ Hal ini diwujudkan oleh keanggotaan aktif Afghanistan di Gerakan Non-Blok (GNB) sejak berdiri tahun 1971. Kebijakan luar negeri Afghanistan di bawah kepemimpinan Ghani terdiri dari lima elemen inti dengan melibatkan (1) negara-negara tetangga Afghanistan, (2) negara-negara Islam, (3) AS, Kanada dan Jepang, (4) negara-negara Asia, dan (5) organisasi internasional.³⁰ Strategi ini selaras dengan prinsip negara non-blok yang menyadari bahwa persekutuan dengan hanya salah satu blok akan menutup kesempatan dalam mendapatkan bantuan luar negeri dari negara lain.

Peranan nasional dari Afghanistan tidak terlepas dari sikap dan peran Ghani sebagai pemimpin yang harus memperbaiki segala aspek permasalahan dalam pemerintahannya, terutama pemberontakan. Salah satu peranan nasional yang sesuai dengan kepentingan dan kondisi negara yang dilanda konflik adalah *internal development*. Peranan nasional ini tidak memiliki fungsi tertentu dalam sistem internasional, tetapi ia beranggapan bahwa sebagian besar tindakan yang dilakukan suatu negara harus diarahkan terhadap masalah pembangunan dalam negeri. Tiga variabel yang digunakan untuk mengidentifikasi peranan nasional ini antara lain kondisi eksternal (ancaman terorisme), atribut nasional (dukungan rakyat), serta atribut ideologi dan sikap pemimpin (optimis).

Tujuan politik luar negeri Afghanistan adalah perdamaian dan stabilitas negara. Ghani menawarkan strategi menarik untuk menangani konflik berkepanjangan di Afghanistan dan melawan terorisme. Program reformasi keamanan multi-dimensi selama empat tahun menjadi dasar penyelesaian politik bagi konflik Afghanistan beserta komponen lainnya yaitu perdamaian Pakistan-Afghanistan dan dialog dengan Taliban. Selain instrumen perdamaian tersebut, Ghani percaya bahwa menanggulangi kemiskinan, reformasi peradilan, dan pembangunan infrastruktur

²⁹ Holsti, *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis*, 138.

³⁰ Massoud Ansar, "MoFA Calls on MPs to Approve Foreign Policy Draft Guideline," *Tolo News*, 21 Desember 2017, <https://tolonews.com/afghanistan/mofa-calls-mps-approve-foreign-policy-draft-guideline>

merupakan faktor utama yang akan menopang perdamaian berkelanjutan di Afghanistan.³¹

Untuk mencapai tujuan politik tertentu, terdapat berbagai cara yang dapat ditempuh oleh pemerintah, antara lain bantuan luar negeri, propaganda, pemakaian hak veto di Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (DK PBB), dan penyelenggaraan konferensi internasional.³² Pemerintah Afghanistan dalam hal ini memilih tindakan persuasi dengan meminta keterlibatan Indonesia dalam upaya perdamaian konflik di negaranya. Cara persuasif Afghanistan tidak mengandalkan adanya imbalan, tetapi murni untuk saling bekerjasama mewujudkan perdamaian. Faktor-faktor apa yang mendorong Ghani untuk memilih Indonesia sebagai mediator dalam upaya penyelesaian konflik dengan Taliban?

Pemilihan Indonesia dalam Upaya Mediasi Konflik Afghanistan

Holsti membagi tiga level analisis untuk menjelaskan politik luar negeri suatu negara: sistem, negara, dan individu. Analisis sistem berusaha menjelaskan perilaku unit politik yang bereaksi terhadap lingkungan eksternal. Respons suatu negara dipengaruhi oleh keseimbangan hubungan di antara unit-unit politik dalam sistem internasional yang sedang berlangsung. Cakupan analisis ini adalah pengaruh tatanan sistem, pengaruh nilai sisemik, serta pengaruh kondisi eksternal. Analisis negara berfokus pada kondisi domestik yang dapat memengaruhi proses pengambilan kebijakan luar negeri. Faktor-faktor ini meliputi kebutuhan ekonomi dan sosial, keamanan, geografi, karakteristik topografi, struktur pemerintahan, atribut nasional, opini publik, serta pertimbangan etik dan birokrasi.³³ Dalam mengkaji sebuah kebijakan, diperlukan pemahaman tindakan dari seorang pengambil kebijakan untuk menghasilkan analisis yang dapat mencakup atau menjawab secara keseluruhan

³¹ Hufsa Chaudhry, "What is Ashraf Ghani's Plan to End Afghanistan's 40-Year Conflict?" *Dawn*, 25 September 2017, <https://www.dawn.com/news/1359337>

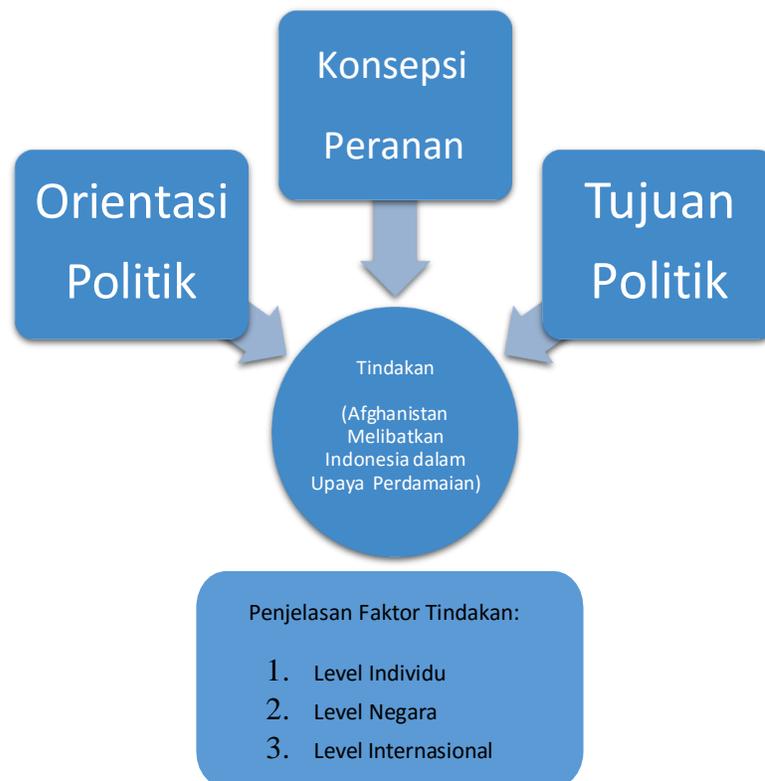
³² Holsti, *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis*, 200.

³³ Holsti, *International Politics: A Framework for Analysis* (Englewoods Cliff, NJ: Prentice-Hall, 1983), 276-277.

faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan tersebut. Analisis individu ini meliputi ideologi, motivasi, cita-cita, persepsi, nilai atau idiosinkrasi.

Analisis politik luar negeri Afghanistan terhadap Indonesia dalam upaya penyelesaian konflik meliputi beberapa komponen seperti yang telah diuraikan di atas: (1) Kesan, nilai, keyakinan serta kepribadian atau kebutuhan politik individual seorang pengambil keputusan, (2) Tatanan dan kondisi sistem internasional, (3) Kebutuhan domestik, dan (4) Nilai sosial serta opini masyarakat dan kelompok berkepentingan khusus.

Bagan 1 Alur Analisis Politik Luar Negeri Afghanistan terhadap Indonesia dalam Upaya Mediasi Konflik (2017-2019)



1. Analisis Level Individu

Mohammad Ashraf Ghani Ahmadzai dilahirkan dari sebuah keluarga Pashtun yang berpengaruh di Afghanistan pada tahun 1949 di Provinsi Logar. Pendidikan awal dasar hingga sekolah menengah atas ditempuh di Habibia, Kabul. Selama masa pertumbuhannya, ia telah familiar dengan urusan politik karena kakek dari pihak ayah seorang komandan militer yang berhasil membantu Raja Nadir berkuasa dan ayahnya seorang pejabat transportasi senior pada masa Raja Zahir. Saat duduk di sekolah menengah pertama tahun 1966, Ghani berangkat ke Oregon, AS sebagai siswa pertukaran. Pengalaman ini membentuk pemikirannya tentang pembangunan dan demokrasi.³⁴ Pada tahun 1973 Ghani menyelesaikan studi gelar sarjana dalam bidang Antropologi di Universitas Amerika di Beirut, Lebanon. Ia sempat mengajar di Universitas Kabul sebelum kemudian melanjutkan studi magister bidang antropologi di Universitas Columbia New York pada tahun 1977. Di universitas yang sama Ghani meraih gelar Ph.D. dengan judul tesis doktoral *Produksi dan Dominasi: Afghanistan, 1747-1901*.³⁵

Di saat perang Afghanistan berkecamuk, pada tahun 1991 Ghani menempa dirinya dalam karir internasional dengan bekerja di Bank Dunia sebagai antropolog utama. Tahun 2001 ia kembali dan bekerja untuk pembangunan Afghanistan sebagai penasihat utusan PBB untuk Afghanistan. Ia juga membantu pengimplementasian Perjanjian Bonn yang membentuk pemerintahan demokratis di Afghanistan. Sebagai penasihat Hamid Karzai, ia mengorganisir *Loya Jirga* yang menyetujui konstitusi dan memilih Karzai. Dia membantu menulis Kerangka Pembangunan Nasional negaranya sambil menjabat sebagai penasihat dan menjadi direktur Otoritas Koordinasi Bantuan Afghanistan (AACA). Sebagai Menteri Keuangan ia meluncurkan mata uang baru, memusatkan pendapatan, memacu pengembangan sistem telepon seluler, dan mengatur sistem pembayaran pajak.

³⁴ George Packer, "Afghanistan's Theorist-In-Chief," *The New Yorker*, 4 Juli 2016, <https://www.newyorker.com/magazine/2016/07/04/ashraf-ghani-afghanistans-theorist-in-chief/>

³⁵ S. Ghilzai, "Biography of Ashraf Ghani," *Afghanistan Online*, 21 Oktober 2015, <https://www.afghan-web.com/biographies/biography-of-ashraf-ghani/>

Setelah lama berkecimpung di pemerintahan, Ghani mengajukan pencalonan diri sebagai presiden pada tahun 2009 setelah melepaskan kewarganegaraan AS, namun ia kalah dan nyaris tidak terdaftar. Pada tahun 2014, ia mencalonkan diri kembali sebagai presiden. Saat itu ada kebencian terhadap orang-orang yang hidup nyaman di Barat selama rakyat Afghanistan menderita yang sebenarnya merupakan sebuah sindiran bagi Ghani. Ia membantah tuduhan ini:

“I don’t have a sense of guilt because I used those 24 years to learn things that this country needed. Had I carried gun, I would have been another gun-toting person, you know there was no shortage of fighters, so it’s not as though we had few volunteers. We lost a million and a half people, and we kept going it. But I thought my task was to be ready for the day the country had an opportunity to reconstruct.”³⁶

Pemikiran dan perspektif Ghani tentang demokrasi, pembangunan negara, ekonomi serta hal-hal birokrasi lainnya memang tidak terlepas dari pengalaman belajarnya di AS, karir internasional, dan kontribusinya dalam pembangunan Afghanistan. Selama bekerja sebagai antropolog di Bank Dunia, Ghani menjadi ahli keuangan di Rusia, China, dan India dengan fokus menuntaskan kemiskinan secara nyata. Ia tidak segan untuk terjun ke lapangan mengamati masalah secara langsung—hal yang tidak biasa dilakukan oleh pejabat Bank Dunia.

Sebagian besar rakyat Afghanistan dan warga Barat melihat Ghani bagaikan orang asing di negaranya sendiri. Tetapi faktanya, dia adalah seorang nasionalis yang percaya bahwa rakyat Afghanistan perlu menetapkan prioritas sendiri untuk mewujudkan pembangunan daripada bergantung pada agenda negara asing dan lembaga internasional yang saling bertentangan. Di balik pemikiran dan pribadi yang terbentuk dari Amerika, tidak lantas ia mengabaikan negaranya yang porak poranda karena perang. Hal ini dibenarkan oleh Zalmai Wafamal, Wakil Duta Besar

³⁶ Jeffrey E. Stern, “This Former John Hopkins Professor Could Be Afghanistan’s Next President,” *The New Republic*, 27 Maret 2014, <https://newrepublic.com/amp/article/117150/ashraf-ghani-ahmadzai-interview-us-prof-afghan-president>

Afghanistan untuk Indonesia. Ghani adalah seorang yang *open minded*, menghargai hak-hak wanita, dan memiliki akal yang cerdas, serta telah memiliki pandangan ke depan tentang agenda nasional untuk Afghanistan dari perkembangan ekonomi, pemerintah yang transparan, serta stabilitas perdamaian dan keamanan.³⁷

Ghani bukan lah seorang *ethnonationalist*. Ia maju dalam pemilihan presiden tahun 2004 sebagai calon independen. Pemilihan tersebut sempat ricuh karena adanya tuduhan penyimpangan suara. Komisi pemilihan Afghanistan lalu melakukan audit yang disponsori oleh PBB dan tetap menetapkan Ghani sebagai presiden Afghanistan. Namun, masyarakat Afghanistan masih terpecah belah, di mana pendukung Abdullah Abdullah merasa kurang puas dengan hasilnya. Tindakan Ghani selanjutnya sangat diapresiasi karena ia setuju untuk pembentukan *National Unity Government* (NUG) yakni berbagi kekuasaan dengan rivalnya Abdullah. Ia memastikan bahwa bawahannya dalam pemerintahan harus mewakili berbagai etnis dan memilih menteri berdasarkan prestasi, meskipun Ghani sendiri seorang Pashtun dan berhutang keberhasilan pemilihannya kepada komunitas Pashtun. Tahun 2019 Ghani maju dalam pemilihan presiden dan kembali terpilih sebagai presiden. Mencapai perdamaian menjadi salah satu visi utama Ghani. Sebagai sosok intelektual berjiwa liberal, Ghani menyadari bahwa pembangunan negerinya akan sulit terwujud jika konflik dengan para pemberontak tidak segera diatasi. Ia percaya bahwa kerjasama dengan negara lain dapat membantu tercapainya perdamaian. Alasan inilah yang akhirnya membawa Ghani ke Indonesia pada tahun 2017 untuk meminta bantuan mediasi dengan Taliban.

2. Analisis Level Negara

Sejak AS dan negara-negara lainnya menyerahkan proses perdamaian kepada Afghanistan, Ghani langsung menggelar Proses Kabul yang merupakan forum multilateral untuk memperoleh dukungan internasional bagi perdamaian di Afghanistan. Namun, Taliban menolak untuk hadir karena tidak mengakui legitimasi Pemerintah Kabul yang baru. Pada pertermuan selanjutnya di bulan Februari 2018,

³⁷ Zalmi Wafamal, dalam sebuah wawancara dengan penulis, 5 Februari 2020.

pemerintah menawarkan perdamaian dengan memberikan Taliban pengakuan partai politik, namun tidak ditanggapi oleh Taliban yang justru mengumumkan serangan di bulan April 2018. Pertemuan antara AS dan Taliban tidak kunjung mencapai kesepakatan karena perbedaan haluan, di mana AS dan pemerintahan Afghanistan menginginkan gencatan senjata permanen dan penegakan demokrasi. Di sisi lain, Taliban tidak menginginkan gencata senjata selagi masih ada pasukan asing dan mereka juga bersikeras mendirikan negara emirat Islam dengan hukum syari'ah. Perbedaan ini menyebabkan kebuntuan upaya penyelesaian konflik di Afghanistan.

Peran ulama sangat berpengaruh di Afghanistan. Tahun 2002 Pemerintah Dewan Ulama Afghanistan (*Afghanistan Ulama Council*) yang merupakan badan resmi keagamaan terbesar di Kabul. Taliban tidak setuju dengan ulama yang berpihak pada pemerintah Afghanistan yang berujung pada serangkaian pembunuhan terhadap mereka yang dianggap sebagai boneka keagamaan pemerintah dukungan Barat, salah korbannya adalah Pemimpin Dewan Ulama Kabul Mawlawi Abdul Basir Haqqani.³⁸

Taliban Afghanistan merupakan bagian dari Taliban Pakistan, di mana dahulu ulama Pakistan berulang kali menyatakan perang di Afghanistan sebagai jihad. Fatwa ulama yang menjadi salah satu pembenaran oleh Taliban mengakibatkan konflik Afghanistan tak pernah usai. Sebagai mediator, Indonesia menginisiasi Konferensi Ulama Trilateral, *Bogor Ulema Declaration for Peace*, antara Afghanistan, Indonesia dan Pakistan pada 11 Mei 2018 tanpa kehadiran Taliban. Ia tidak diundang karena perbedaan sudut pandang dalam hal aksi bunuh diri dan serangan terhadap warga sipil. Salah satu poin di deklarasi tersebut menyatakan bahwa kekerasan dan aksi terorisme tidak boleh diasosiasikan dengan agama, kewarganegaraan, peradaban,

³⁸ Rupam Jain, "Senior Cleric in afghanistan's Top Religious Body Killed," *Reuters*, 24 November 2019, <https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-attack-religion/senior-cleric-in-afghanistans-top-religious-body-killed-idUSKCN1NT0IH>

atau etnis tertentu. Kekerasan ekstremisme dalam bentuk apapun dianggap bertentangan dengan prinsip Islam.³⁹

Sebelum pertemuan ini dilaksanakan, Taliban sempat mencurigai dan mengkritik Indonesia berkaitan dengan penyelenggaraan konferensi ulama Islam yang didukung AS. Pada akhirnya, konferensi tersebut tidak mengeluarkan fatwa anti-jihad Afghanistan. Inilah yang membuat Taliban akhirnya yakin bahwa Indonesia dapat membawa perdamaian di Afghanistan yang dibuktikan oleh kehadiran delegasi Taliban dari Kantor Politik Taliban di Doha ke Indonesia.⁴⁰ Pendekatan Indonesia dalam proses mediasi melalui kumpulan para ulama merupakan sebuah cara yang cukup efektif mengingat permasalahan awal mengenai pemahaman agama yang keliru serta peran ulama yang sangat berpengaruh dalam ranah kehidupan negara Islam. Indonesia pun yang mempunyai basis organisasi keislaman yang kuat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama Nahdlatul Ulama (NU) bersinergi untuk membantu proses mediasi antara Afghanistan dan Taliban. Adanya komposisi yang sama seperti peran ulama, Afghanistan dan Indonesia lebih mudah memahami dinamika dunia Islam yang kompleks sehingga keputusan Afghanistan memilih Indonesia sebagai mediator dapat berdampak baik kepada perkembangan proses perdamaian Afghanistan.

3. Analisis Level Internasional

Analisis pada level ini mengacu pada faktor-faktor eksternal yang memengaruhi keputusan Afghanistan memilih Indonesia sebagai mediator konflik. Pertama, kegagalan *South Asian Association for Regional Cooperation* (SAARC) dalam membantu penyelesaian konflik Afghanistan. Perlawanan terhadap terorisme di kawasan Asia Selatan telah tertera di Konvensi SAARC tentang Penindasan

³⁹ Galih Gumelar, "Ulama Afghanistan Berharap Taliban Ikut Pertemuan Berikutnya," *CNN Indonesia*, 12 Mei 2018, <https://m.cnnindonesia.com/internasional/20180511164945-106-297480/ulama-afghanistan-berharap-taliban-ikut-pertemuan-berikutnya>

⁴⁰ Tufail Ahmad, "Indonesia's Growing Engagement with The Afghan Taliban," *MEMRI Daily Brief* No. 194, 5 Agustus 2019, <https://www.memri.org/reports/indonesias-growing-engagement-afghan-taliban>

Terorisme pada tahun 1987. Konvensi ini juga menghasilkan Protokol Tambahan tentang Terorisme yang sejalan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1373 dengan mempertimbangkan struktur pendanaan teroris.⁴¹Protokol Tambahan ini baru diadopsi tahun 2005 setelah perdebatan mengenai definisi terorisme. Meskipun begitu, tidak banyak antusiasme negara-negara anggota ini untuk memperkuat kerjasama dalam isu-isu kekerasan teroris serta pendanaan negara anggota terhadap isu ini. Saat ini, kerjasama terbatas pada inisiatif bilateral bagi negara yang berkepentingan.

Kedua, persaingan India-Pakistan yang menyebabkan rendahnya tingkat kepercayaan antarnegara anggota SAARC. Konflik India dan Pakistan tidak hanya terbatas perebutan wilayah dan tuduhan terorisme, tetapi juga mengenai persaingan pengaruh di negara-negara Asia Selatan tak terkecuali Afghanistan. Melihat kedekatan Presiden Afghanistan terdahulu Hamid Karzai dengan India, Mantan Presiden Pakistan Pervez Musharraf menyatakan bahwa pengaruh India di Afghanistan menjadi ancaman bagi Pakistan. Langkah India yang aktif membantu Afghanistan sejak 2001 dan melakukan investasi dimaksudkan untuk meminimalisir pengaruh Pakistan di Afghanistan. Tuduhan Afghanistan akan dukungan Islamabad terhadap Taliban semakin memperkeruh hubungan kedua negara. Saat Ghani menjabat sebagai presiden, ia seolah mengabaikan persaingan India dan Pakistan di Afghanistan dan malah memperkuat hubungannya dengan AS. Dengan kata lain, Ghani seakan tidak banyak berharap memperoleh dukungan dari negara-negara tetangga di kawasan. Menurut Staf Direktorat Asia Selatan dan Tengah, Kementerian Luar Negeri Indonesia, Rafathonah,

“Tidak hanya itu, Afghanistan memilih Indonesia yang notabene ada di Asia Pasifik karena hubungan India dan Pakistan yang tidak harmonis, maka dari itu saat ini organisasi Asia Selatan yaitu SAARC tidak efektif. Di ASEAN tidak ada konflik seperti India dan Pakistan. Semakin sedikit lingkup pihak yang

⁴¹ Irum Shaheen, “South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC): Its Role, Hurdles and Prospects,” *Journal of Humanities and Social Science* 15, no. 6 (2013): 1-9.

terlibat semakin mudah untuk menyelesaikan. Jadi intinya melangkah dengan organisasi ini lebih sulit. Dinamikanya berat di internal. Ini apalagi ada kasus India dan Pakistan. Bagaimana ingin memikirkan Afghanistan, internal konfliknya saja pekerjaannya banyak. Pastinya India lebih memilih untuk fokus terhadap permasalahannya dengan Pakistan negara yang lebih besar dari Afghanistan.”⁴²

4. Daya Tarik Indonesia Sebagai Mediator

Selain meminta Indonesia sebagai juru damai di konflik Afghanistan, dalam kunjungannya Ghani sangat antusias untuk belajar tentang Islam Indonesia, terutama konsep *Rahmatan lil ‘alamin* dan *Ukhuwah Islamiyah*. Di panggung internasional Indonesia terkenal dengan politik luar negeri bebas-aktif yang berarti Indonesia berhak sepenuhnya menentukan arah, sikap, dan keinginannya sebagai negara merdeka dan berdaulat, serta aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Sejak awal invasi AS tahun 2001, Indonesia sudah terlibat aktif dalam mengupayakan perdamaian di Afghanistan, misalnya dengan memberikan bantuan kemanusiaan yang bekerjasama dengan Norwegia. Peran Indonesia di Afghanistan juga terus berlangsung baik itu secara bilateral sebagai mediator, maupun multilateral melalui *United Nations Mission in Afghanistan (UNAMA)*.

Indonesia adalah salah satu negara yang aktif dalam proses perdamaian serta dianggap berhasil dalam penyelesaian konflik. Tahun 2016 Jakarta menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi K Islam (KTT OKI) Luar Biasa ke-5 yang membahas, antara lain, proses perdamaian Israel-Palestina, proses perdamaian Mindanao di Filipina yang juga bekerjasama dengan organisasi masyarakat sipil, serta negosiasi pembebasan dua nelayan Indonesia yang disandera gerilyawan Abu Sayyaf.⁴³ Hal ini juga sangat diapresiasi oleh *High Peace Council (HPC)* Afghanistan

⁴² Rafathonah (Staff Kemenlu Bagian Direktorat Asia Selatan dan Tengah), dalam sebuah wawancara dengan penulis, 6 Februari 2020.

⁴³ Ahmad Rizky M. Umar, “Indonesia’s ‘Islamic Diplomacy’ Seeks to Broker an Afghan Peace,” *The Interpreter*, 20 Maret 2018, <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/indonesia-s-islamic-diplomacy-seeks-broker-afghan-peace>

yang menyampaikan bahwa Islam moderat yang berkembang di Indonesia merupakan contoh penerapan Islam yang benar serta dianggap netral sehingga dapat berperan dalam penyelesaian konflik

.Selain peran aktif pemerintah di Jakarta, aktor non-negara seperti organisasi Islam ikut terlibat dalam mengupayakan perdamaian di Afghanistan. Jauh sebelum Afghanistan meminta Indonesia menjadi mediator, NU sendiri pernah berinisiatif terlibat dalam upaya *second track diplomacy* dengan mengundang kelompok Afghanistan yang bertikai untuk berunding dengan Pengurus Besar NU (PBNU) pada tahun 2011. Pada tanggal 4-5 Juni 2013, Wakil Ketua Umum (Waketum) PBNU, KH. As'ad Said Ali beserta para petinggi PBNU, mendapatkan fasilitas diplomatik dari Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemenlu RI) untuk mengunjungi Kabul dalam rangka pembahasan proses mediasi antara faksi yang berselisih di Afghanistan.⁴⁴ Aktivitas diplomasi NU menginspirasi ulama-ulama Afghanistan untuk ikut mendirikan NU Afghanistan untuk menyebarkan ajaran Islam yang moderat.

Kesimpulan

Pemilihan Indonesia sebagai mediator dalam upaya mediasi konflik Afghanistan pada tahun 2017-2019 bukan hanya dilandasi oleh solidaritas Islam. Sejak invasi AS tahun 2001, Afghanistan telah cukup lama bergantung pada strategi AS dan aliansinya. Namun, semenjak memimpin perdamaannya sendiri, Afghanistan memilih strategi mediasi dengan melibatkan Indonesia sebagai pihak penengah antara pemerintah Kabul dengan kelompok Taliban. Banyak pilihan aktor lainnya yang dapat membantu konflik Afghanistan, tetapi Indonesia dilirik karena keaktifan dan pengalamannya dalam menjaga perdamaian negeri serta dunia.

⁴⁴ Muhammad Ibrahim Hamdani, "Peran NU dalam Proses Perdamaian di Afghanistan," *NU Online*, 19 November 2013, <https://www.nu.or.id/post/read/48291/peran-nu-dalam-proses-perdamaian-di-afghanistan>

Referensi

- Abassi, Ellaha. "Afghanistan, Negotiations with the Taliban: Analysis of the Post-2001 Negotiation Process Through the Application of the Path Dependency Theory." (Tesis Magister, Universiteit Leiden, 2016).
- "Afghanistan Profile – Timeline." *BBC*. 9 September 2019. <https://www.bbc.com/news/world-south-asia-12024253>
- Ahmad, Tufail. "Indonesia's Growing Engagement with The Afghan Taliban." *MEMRI Daily Brief* No. 194. 5 Agustus 2019. <https://www.memri.org/reports/indonesias-growing-engagement-afghan-taliban>
- Al Hamid, Thalha, dkk. *Resume Instrumen Pengumpulan Data*. Sorong: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2019.
- Aminah, S. dan Roikan. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*. Jakarta: Prenamdia Group, 2019.
- Ansar, Massoud. "MoFA Calls on MPs to Approve Foreign Policy Draft Guideline." *Tolo News*. 21 Desember 2017. <https://tolonews.com/afghanistan/mofa-calls-mps-approve-foreign-policy-draft-guideline>
- Bezhan, Frud. "Loya Jirga: An Afghan Tradition Explained." *Radio Free Europe/Radio Liberty*. 20 November 2013. <https://www.rferl.org/a/afghanistan-loya-jirga-explainer/25174483.html>
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Cassidy, Robert M. "The Afghanistan Choice: Peace or Punishment in the Pashtun Belt." *The RUSI Journal* 155, no. 4 (2010): 38-44.
- Chaudhry, Hufsa. "What is Ashraf Ghani's Plan to End Afghanistan's 40-Year Conflict?" *Dawn*. 25 September 2017. <https://www.dawn.com/news/1359337>
- Clemmens, D. "Adolescent Motherhood: A Meta-Synthesis of Qualitative Studie." *American Journal of Maternal Child Nursing* 28, no. 2 (2003): 93-99.
- Cordesman, Anthony H. *Afghanistan: A War in Crisis* (Center for Strategic & International Studies, 2019).
- Creswell, John M. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

- D'Souza, Shantie Marier. "Taliban: The Rebels Who Aspire to be Rulers." *Journal of Asian Security and International Affairs* 3, no. 1 (2016): 20-40.
- Dugis, Vinsensio. "Explaining Foreign Policy Change." *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik* 21 (2): 101-104.
- Ghilzai, S. "Biography of Ashraf Ghani." *Afghanistan Online*. 21 Oktober 2015. <https://www.afghan-web.com/biographies/biography-of-ashraf-ghani/>
- Gumelar, Galih. "Ulama Afghanistan Berharap Taliban Ikut Pertemuan Berikutnya." *CNN Indonesia*. 12 Mei 2018. <https://m.cnnindonesia.com/internasional/20180511164945-106-297480/ulama-afghanistan-berharap-taliban-ikut-pertemuan-berikutnya>
- Hamdani, Muhammad Ibrahim. "Peran NU dalam Proses Perdamaian di Afghanistan." *NU Online*. 19 November 2013. <https://www.nu.or.id/post/read/48291/peran-nu-dalam-proses-perdamaian-di-afghanistan>
- Hamdi, M.P. A., Prof. Dr. Muchlis dan Dr. Siti Ismaryati. "Modul 1: Filosofi Penelitian." <http://repository.ut.ac.id/4613/1/MAPU5103-M1.pdf>
- Haris, Umiyati. "Penyelesaian Konflik Afghanistan-Pakistan: Sebuah Pendekatan Rekonsiliasi." (Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2016).
- Holsti, K. J. "National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy." *International Studies Quarterly* 14, no. 3 (1970): 233-309.
- Holsti, K. J. *International Politics: A Framework for Analysis*. Englewoods Cliff, NJ: Prentice-Hall, 1983.
- Holsti, K. J. *Politik Internasional: Kerangka untuk Analisis, Edisi Keempat, Jilid Kedua*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1983.
- Holsti, K. J. *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis*. Bandung: Binacipta, 1992.
- "Ikhtiar Indonesia Damaikan Afghanistan dan Taliban." *CNN Indonesia*. 31 Juli 2019. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190730180456-106-416860/ikhtiar-indonesia-damaikan-afghanistan-dan-taliban>
- Initiative Mediation Support Deutschland. "Basics of Mediation: Concepts and Definitions." Januari 2016 (revisi Januari 2017). <https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/Basics%20of%20Mediation.pdf>

- Jain, Rupam. "Senior Cleric in afghanistan's Top Religious Body Killed." *Reuters*. 24 November 2019. <https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-attack-religion/senior-cleric-in-afghanistans-top-religious-body-killed-idUSKCN1NT0IH>
- Katzman, Kenneth dan Clayton Thomas. "Afghanistan: Post-Taliban Governance, Security, and U.S. Policy," *Congressional Research Service*. 13 Desember 2017. <https://fas.org/sgp/crs/row/RL30588.pdf>
- Masaoda. "Rekam Jejak Aktivitas Taliban di Afghanistan Tahun 2014-2018 (Era Presiden Ashraf Ghani)." (Skripsi, Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2018).
- Packer, George. "Afghanistan's Theorist-In-Chief." *The New Yorker*. 4 Juli 2016. <https://www.newyorker.com/magazine/2016/07/04/ashraf-ghani-afghanistans-theorist-in-chief/>
- Prasetyo, H Handy Dwi. "Politik Luar Negeri Indonesia dalam Membantu Proses Perdamaian di Afghanistan (2011-2016)." (Skripsi, Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2017).
- Riedel, Bruce. "Pakistan, Taliban, and the Afghan Quagmire." *The Brookings Institute*. 24 Agustus 2013. <https://www.brookings.edu/opinions/pakistan-taliban-and-the-afghan-quagmire/>
- Samad, Omar. "An Afghan Opening: Opportunities, Challenges, and Pitfalls." *Atlantic Council*. 11 Juli 2019. <https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/an-afghan-opening-opportunities-challenges-and-pitfalls/>
- Shaheen, Irum. "South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC): Its Role, Hurdles and Prospects." *Journal of Humanities and Social Science* 15, no. 6 (2013): 1-9.
- Stern, Jeffrey E. "This Former Johnn Hopkins Professor Could Be Afghanistan's Next President." *The New Republic*. 27 Maret 2014. <https://newrepublic.com/amp/article/117150/ashraf-ghani-ahmadzai-interview-us-prof-afghan-president>
- Swanström, Niklas L. P. dan Mikael S. Weissman. "Conflict, Conflict Prevention, Conflict Management and Beyond: A Conceptual Exploration." Concept Paper, Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program, 2005. https://www.files.ethz.ch/isn/113660/2005_swanstrom-weissman_concept-paper_conflict-prevention-management-and-beyond.pdf

Umar, Ahmad Rizky M. "Indonesia's 'Islamic Diplomacy' Seeks to Broker an Afghan Peace." *The Interpreter*. 20 Maret 2018. <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/indonesia-s-islamic-diplomacy-seeks-broker-afghan-peace>

Wahyuni, Sari. *Qualitative Research Method: Theory and Practice*. Jakarta: Salemba Empat, 2015.